

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BANTUAN BERAS MISKIN (RASKIN)
DIDESA KALISONGO
(PENYEDIAAN SEBAGIAN KEBUTUHAN PANGAN POKOK RUMAH
TANGGA MISKIN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik**



Oleh:

PAULINA LEDU

2018210182

**MANAJEMEN PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TRIBHUWANA
TUNGGADEWI MALANG**

2022

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bantuan raskin dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bantuan raskin di desa kalisongo (penyediaan sebagian kebutuhan pangan pokok rumah tangga miskin). Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan fokus kejelasan yang hendak dicapai, kemampuan kerja sama dan loyalitas yang tinggi dengan sarana dan prasarana yang tersedia oleh pemerintah desa, dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien. Sumber data diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan insidental dengan kunci informannya adalah masyarakat penerima raskin desa kalisongo. Hasil dari penelitian efektivitas pelaksanaan bantuan beras miskin (raskin) di desa kalisongo (penyediaan sebagian kebutuhan pangan pokok rumah tangga miskin) sudah berjalan dengan baik. dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor pendukung kerjasama terjalin sangat baik sehingga Faktor muncul rasa kekeluargaan Serta rasa tanggung jawab yang tinggi. (2) faktor penghambat masih kurang luasnya sosialisasi atau pendataan yang diberikan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas; Raskin; Kebutuhan Pangan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia mempunyai wilayah dengan kawasannya yang cukup serta penduduk yang cukup padat. Maka dalam suatu wilayah yang padat penduduk, tidak menutup kemungkinan bahwa penduduk yang tinggal di daerah tersebut sebagiannya terdapat penduduk yang berkecukupan maupun penduduk yang tidak berkecukupan. Hal ini bisa dilihat dari adanya kegiatan pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan, yang dikarenakan antara lain perekonomian yang dimiliki tidak memadai dan rendahnya pendapatan perkapita, sehingga terdapat banyak kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan nantinya akan menimbulkan berbagai faktor dari kemiskinan. Selain itu juga disebabkan karena sumber daya manusia yang rendah sehingga berpotensi pada pengangguran. Oleh karena itu pemerintahan menyediakan pelayanan untuk masyarakat atau pelayanan publik (Lukman Sampara 2000: 112).

Memiliki keterkaitan dengan kehidupan dalam bermasyarakat yang terbilang luas dan kompleks sebagai faktor pendorong dalam proses pencapaian perubahan yang lebih berkualitas yang terdapat dalam pemerintahan di daerah disebut layanan yang berbasis umum. Bagaimanapun negara yang terbilang kecil nantinya akan mampu melakukan pembagian terkecil pemerintahannya disesuaikan dengan beberapa bagian daerah dengan tujuan mempermudah wewenang dan juga tugas yang nantinya akan dilimpahkan. Khususnya Indonesia yang melakukan pembagian beberapa daerah dalam mengoperasikan pemerintahan yang disesuaikan dengan undang-undang dengan melakukan peningkatan yang telah menjadi dasar pemerintahan yang bersistem pada negara serta hak yang berasal dan juga bersul yang nantinya terdapat di daerah yang terbilang istimewa. Saat berada pada kehidupan dengan fungsi pemerintahan dalam bernegara dengan macam-macam jenis dari pelayanan yang

berbasis umum yang nantinya diperlukan khalayak umum seperti masyarakat yang nantinya melakukan layanan seperti regulasi serta layanan pemenuhan sesuai kebutuhan masyarakat sesuai bidang seperti ekonomi dan pendidikan dan juga kesehatan dan sebagainya. Pemerintahan terkecil di setiap daerah mampu menguasai layanan publik yang berpengaturan dengan tujuan merubah pola pikir dan juga cara kerjanya dalam sebuah sistem dengan penyesuaian otonomi yang dijalankan oleh daerah mulai dari pemberian dan juga peningkatan layanan yang terbilang memberikan kepuasan khalayak umum dalam hal ini masyarakat.

Pelayanan umum yang dijalankan oleh pemda tentunya diberikan kesempatan yang terbilang luas untuk setiap warga dan juga masyarakat dalam bentuk layanan untuk memperoleh pengaksesan layanan yang umum sesuai prinsip transparansi dan kesetaraan dan juga keadilan serta akuntabilitas, dimana layanan umum yang berkonsep mempunyai hubungan dengan usaha yang ditingkatkan yang berkapasitas dan mampu memerintah dan juga melakukan pelaksanaan layanan yang berfungsi dalam hal ini bermetode ekonomi sesuai konteksnya yang nantinya menyediakan kebutuhan yang terbilang dasar untuk khalayak umum seperti masyarakat. Tantangan dan juga adanya peluang sebagai dampak dari globalisasi untuk melakukan perbaikan pada bidang ekonomi, mutu pelayanan memiliki peran yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah dalam memahaminya dan juga bertujuan untuk pencapaian kualitas layanan. Masyarakat yang terbilang sejahtera ditentukan oleh layanan yang disediakan pemerintah agar tidak terjadi yang namanya kemiskinan sebagai kondisi tidak mampunya dalam hal ini pendapatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan yang paling dasar dan ketidakmampuan dalam melakukan penjaminan hidup yang berlangsung (Suryawati, 2004:122).

Kondisi yang membuat pemerintah indonesia perlu mengadakan suatu program bantuan untuk membantu meringankan beban masyarakat di indonesia. Pemerintah merencanakan kegiatan dan juga program dalam hal penganggaran yang dilakukan di tahun

2021 yang bertarget subsidi dengan bahan beras untuk kepentingan masyarakat yang tentunya mempunyai pendapatan yang terbilang rendah yang diberikan oleh pemerintah dan juga dilakukan agenda berkategori nasional dalam membangun dan juga bantuan nutrisi pada pangan.koordinator dari pembangunan dalam hal ini bidang manusia dan juga kebudayaan memiliki tanggung jawab dalam berkoordinasi dan sinkronisasi dan juga pengendalian layanan program perlindungan sosial yang nantinya terdapat program dalam kebijakan subsidi seperti sembako beras untuk masyarakat dengan penghasilan yang terbilang rendah. Sesuai dengan yuridis dan juga filosofis bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi yang menjadi kebutuhan yang paling dasar dari hak asasi dari manusia. Penetapan masyarakat miskin perlu mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah dalam hal ini untuk penduduk yang mempunyai penghasilan yang terbilang paling rendah dimaknai sebagai ketahanan pangan yang berbasis nasional melalui sistem. Komoditas dan juga yang menjadi hak dasar dari setiap orang yang mendapatkan perlindungan berdasarkan uud 1945 disebut pangan. Pemerintah melakukan prioritas dan paling terkhusus pada regulasi pangan yang dipertahankan yang berbasis nasional dan juga untuk semua penduduk dengan konsumsinya beras yang telah dijadikan sebagai bahan pokok untuk makanan, sehingga melalui beras telah menjadi pangan nasional yang terbilang strategis. Instabilitas yang berbasis nasional yang diperbesar mampu memunculkan adanya gejolak setiap aspek dari kehidupan seperti sosial dan ekonomi maupun politik.

Komoditi yang berbasis makanan mempunyai peran dalam garis dari kemiskinan terbilang besar dengan perbandingannya bersama yang bukan dari makanan dalam hal ini komoditi seperti sandang dan perumahan dan juga pendidikan serta kesehatan. Komoditi yang berbasis makanan mempunyai pengaruh yang terbilang besar pada nilai dari garis pada kemiskinan yaitu beras. Bahwa beras sebagai komoditas paling primer terkhususnya masyarakat yang terbilang miskin. Subsidi beras yang asalnya dari pemerintah sebagai

komoditas untuk keperluan masyarakat yang tentunya rendah pendapatan sebagai pengimplementasian berdasarkan instruksi dari presiden tentang kebijakan beras secara nasional. Melalui menteri dan juga ketua dari lembaga government non kementerian, dan juga gubernur serta bupati ataupun walikota yang tentunya terdapat di Indonesia dengan peningkatan melalui upaya petani yang ditingkatkan pendapatannya, pangan yang mempunyai ketahanan dan ekonomi yang dikembangkan di desa untuk ekonomi secara nasional yang stabil.

Beras merupakan salah satu makanan yang terbilang sangat pokok untuk dikonsumsi masyarakat bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah melakukan persediaan beras yang nantinya dibutuhkan oleh masyarakat. Beras yang dikonsumsi penduduk tidak merata dalam perolehannya karena daya beli terlalu rendah untuk masyarakat dalam hal beras yang dibutuhkan, dan juga pemerintah diperlukan untuk membuat regulasi dengan tujuan melakukan pengaturan persediaan kebutuhan dasar pada bidang pangan yang nantinya untuk masyarakat. Masyarakat yang mempunyai penghasilan yang terbilang rendah dalam hal rumah tangga dan mendapatkan subsidi beras yang dimaknai dengan kerja keras pemerintah dalam melakukan perlindungan dari sosial untuk setiap rumah penduduk disebut Raskin. Melalui Raskin bertujuan melakukan pengurangan pengeluaran rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan dasar dalam bentuk beras, pemaknaannya sebagai tidak lagi mengalami kesulitan dalam pemenuhan pangan keluarga yang dibutuhkan. Program yang terbilang umum pada subsidi bahan dasar dari pangan yaitu beras untuk masyarakat dengan penghasilan rendah (Pedum Raskin, 2013) sebanyak 15 kg bahan dasar pangan diberikan untuk keluarga dalam sebulan dengan biaya 1.600 per kg, dan harga sebagai distribusi harga titik. Melalui penerima menanggung biaya dan juga titik dari distribusi dan Raskin dilakukan pembagian setiap bulannya dan juga sesuai titik pendistribusian berdasarkan kesepakatan waktu, dan juga kesesuaian perencanaan yang dibutuhkan siapnya dari bermacam pihak.

Koordinasi memerlukan stakeholder supaya tumpah tindihnya aturan tidak terjadi dan dalam melakukan bentuk suksesnya program yang dibentuk sesuai kesepakatan tim dalam koordinasi pada raskin yang melaksanakan tugas dari pusat sampai pada desa. Begitu juga dengan Desa Kalisongo kecamatan Dau Kabupaten Malang yang memiliki Tim Raskin di Desa maupun di kecamatan. Berdasarkan hal tersebut, maka saya tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Beras Miskin (Raskin) Di Desa Kalisongo (Penyediaan Sebagian Kebutuhan Pangan Pokok Rumah Tangga Miskin)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Beras Miskin (Raskin) dalam membantu penyediaan sebagian kebutuhan pangan pokok Rumah Tangga miskin di Desa Kalisongo?
2. Faktor Pendukung dan penghambat Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Beras Miskin (Raskin) dalam membantu penyediaan sebagian kebutuhan pangan pokok Rumah Tangga miskin di Desa Kalisongo?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bantuan raskin di desa kalisongo penyediaan sebagian kebutuhan pangan pokok rumah tangga miskin di Desa Kalisongo.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaan bantuan raskin di desa kalisongo (penyediaan sebagian kebutuhan pangan pokok rumah tangga miskin).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dilakukan pembandingan atas penelitian serupa yang membahas terkait bantuan yang dilaksanakan yang efektif di desa kalisongo (penyediaan sebagian pangan dasar yang dibutuhkan pada rumah tangga yang terbilang miskin).

2. Manfaat praktis

Sebagai sumbangan ilmu dalam memberikan gambaran dan informasi bagi semua pihak, khususnya masyarakat dalam memahami efektivitas bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrida, Rini; Setiadi Djohar; Iqkan Fahmi. 2011. *Analisis Kepuasan Rumah Tangga Penerima Manfaat Raskin Di DKI Jakarta*. Jurnal manajemen dan Agribisnis 8(1),hlm:20-31.Sekolah Tinggi PPM Manajemen. Jakarta. BPS (Badan Pusat Statistik). 2013. *Kemiskinan*. <http://www.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 20 September 2013. K
- Effendi Sofian. 2012. *Metode Penelitian Survei*.Jakarta:LP3EKemenko Kesra (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat). 2013. *Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (PEDUM RASKIN)*. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
- Kantor Desa Katangka, *Data Rumahtangga Miskin Penerima Beras Miskin 5 Tahun Terakhir Mulai Tahun 2011 s/d 2015* Lukman, Sampara. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta:STIA LAN Press.
- Ramayani, Fitria. 2013. *Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*. Jurnal administrasi Negara FISIP Universitas Riau. [Online]. Tersedia di: [http:// repository.unri. ac.id/bitstream /123456789 / 1195/1/ JURNAL %20 FITRIA %20 RAMADAYANI .pdf](http://repository.unri.ac.id/bitstream/123456789/1195/1/JURNAL%20FITRIA%20RAMADAYANI.pdf). [diunduh: 7 September 2013].
- Rofiq, Aunur. *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kebijakan dan Tantangan masa Depan*. Jakarta: Republika, 2014.
- Sam F. Poli. *Memperdayakan kaum Miskin*. Yogyakarta: 2010
- Suryawati. 2004. *Prinsip-Prinsip Kesetaraan Transparansi Akuntabilitas dan Keadilan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono.2016. *Metode Penelitan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.Bandung: Alfabeta.
- Sudiarso. 2012. *Kajian Efektivitas Program Raskin di Jawa Timur*.Pangan Media Komunikasi dan Informasi.

Wargadinata, Wildana. 2011. *Islam & Pengentasan Kemiskinan*. Malang : UIN
Malang Press

Windha. 2013. *Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Desa Sejiram
Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu*. Prodi Ilmu
Pemerintahan FISIP UNTAN. 1(1), hlm: 1-13.